

## NILAI-NILAI PANCASILA DAN DINAMIKA ETIKA POLITIK INDONESIA

Farah Sabilla Febriany, dan Dinie Anggraeni Dewi

Universitas Pendidikan Indonesia, Cibiru, Indonesia

E-mail : 12farahsabilla@upi.edu, dan diniangreabidewi@upi.edu

### INFO ARTIKEL

#### Diterima

10 April 2021

Diterima dalam bentuk  
review 12 April 2021

Diterima dalam bentuk  
revisi 21 April 2021

#### Keywords:

political ethics; pancasila;  
politics.

#### Kata Kunci:

etika politik; pancasila;  
politik.

### ABSTRAK

*Pancasila is the basis of the state and also the way of life of the Indonesian nation which contains noble values that reflect the life of the Indonesian people, because these values are extracted from the soul and personality of the Indonesian nation since ancient times. The purpose of this research is to understand the concept of political ethics itself and to understand the values of Pancasila in political ethics in Indonesia. In this study, the subject of research is literature related to Pancasila, political ethics, and also the political dynamics of Indonesian society. This research method with a discussion of political ethics and the principles of Pancasila in political ethics in Indonesia uses a descriptive approach. The results of this study found that political ethics is a moral philosophy that governs political life in Indonesia, but political ethics in Indonesia still needs to be improved, Pancasila as the basis of the state through its values explains that it is sufficient to improve political ethics in Indonesia.*

### ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdapat nilai-nilai luhur yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia, sebab pada dasarnya nilai-nilai tersebut digali dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami konsep etika politik itu sendiri, serta agar paham pada nilai-nilai Pancasila dalam etika politik di Indonesia. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah literatur yang terkait dengan Pancasila, etika politik, dan juga dinamika politik masyarakat Indonesia. Metode penelitian dengan bahasan etika politik dan sila-sila Pancasila dalam etika politik di Indonesia ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa etika politik merupakan suatu filsafat moral yang menata kehidupan politik di Indonesia, namun kenyataannya etika politik di Indonesia dapat dikatakan masih perlu untuk diperbaiki, Pancasila sebagai dasar negara melalui nilai-nilainya menjelaskan bahwa cukup untuk memperbaiki etika politik di Indonesia.

Attribution-ShareAlike 4.0  
International  
(CC BY-SA 4.0)



## **Pendahuluan**

Menurut (Ruslan, 2013) Pancasila merupakan sebuah konsep pemikiran yang menjadi dasar bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap aspek yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila adalah kristalisasi nilai luhur bangsa Indonesia semenjak zaman dahulu.

Eksistensi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia kemudian direpresentasikan dalam lima sila Pancasila. Kelima sila tersebut diharapkan mampu menyatukan dinamisnya kehidupan masyarakat Indonesia. Di samping itu, Pancasila juga dianggap sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang bersifat lestari yang memuat ide-ide yang patut untuk diperjuangkan (Rahayu, 2017).

Para pendiri bangsa telah melakukan perundingan yang panjang untuk dapat menciptakan keputusan final dan melahirkan Pancasila pada 1 Juni 1945 silam. Sebagai kumpulan nilai-nilai yang lestari, Pancasila tentu memiliki sejumlah fungsi dalam mendukung perkembangan bangsa Indonesia. Fungsi-fungsi tersebut misalnya merupakan pedoman hidup bangsa atau yang biasa dikenal dengan *way of life*, yang merupakan sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, dan juga sebagai pemersatu kemajemukan masyarakat Indonesia. Fungsi eksistensi Pancasila tersebut seharusnya sudah menjadi suatu hal yang tak terpisahkan oleh warga negara, sebab pada dasarnya fungsi-fungsi tersebut berasal dari masyarakat Indonesia sendiri.

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai latar belakang suku bangsa, agama, ras, ataupun warna kulit. Namun, perbedaan tentunya tidak sampai di situ saja, masyarakat Indonesia juga berbeda dari segi cara pandang terhadap suatu hal, persepsi, juga prinsip hidup. Salah satu bentuk perbedaan cara pandang terhadap suatu hal adalah perbedaan sikap politik masyarakat Indonesia. Persoalan ini kemudian dirasa sangat krusial dan Pancasila akan memainkan peran penting di dalamnya. Dapat dikatakan demikian karena setiap tahun konflik karena perbedaan pandangan politik masih sering terjadi. Oleh karena itu, untuk mengkaji secara lebih dalam, penelitian ini akan dilakukan dengan landasan tiga rumusan masalah yaitu bagaimana konsep etika politik, bagaimana etika politik di Indonesia dan bagaimana nilai-nilai Pancasila pada etika politik di negara ini. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami konsep etika politik, dalam memahami etika politik di Indonesia, serta dalam memahami pedoman-pedoman Pancasila dalam etika politik. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kembali menguatkan etika politik masyarakat Indonesia meminimalisasi konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia akibat pelaksanaan etika politik yang tidak maksimal.

## **Metode Penelitian**

Penelitian dengan bahasan etika politik dan sila-sila Pancasila dalam etika politik di Indonesia ini akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah untuk memaparkan fakta yang ada di lapangan secara apa adanya, tanpa dikenakan perlakuan apa pun. Data yang akan disajikan adalah data fakta baik dalam kualitatif (Gorys Keraf, 2010). Secara lebih jelas, data-data yang terkait nilai-nilai Pancasila dan dinamika

politik masyarakat Indonesia yang diperoleh akan dipaparkan secara kualitatif. Data penelitian ini diambil dalam kurun waktu dua hari.

Teknik pengumpulan data dalam kurun waktu dua hari tersebut dilakukan dengan studi literatur. Teknik studi literatur dijalankan dengan bertujuan untuk memperoleh ide-ide yang telah disampaikan oleh para ahli sebelumnya. Teori teori tersebut nantinya akan digunakan sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari publikasi angket, apakah data yang diperoleh sesuai dengan teori atau tidak.

Penelitian ini juga melibatkan subjek dan objek penelitian, yang mana menurut (Rahardjo, 2017) subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian, tempat yang dimaksud dapat berupa seseorang atau sesuatu yang ingin diperoleh datanya. Sedangkan objek penelitian (Suharjito, 2019). Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian merupakan literatur yang terkait dengan Pancasila, etika politik, dan juga dinamika politik masyarakat Indonesia. Objek penting dalam penelitian ini adalah nilai-nilai Pancasila, etika politik, serta dinamika politik masyarakat Indonesia. Data-data yang telah didapatkan kemudian akan digarap dan ditelaah untuk diambil sebuah kesimpulan mengenai Pancasila dan kaitannya dengan etika politik serta dinamik politik masyarakat Indonesia agar dapat ditarik solusi persoalan perpolitikan negeri.

### **Hasil dan Pembahasan**

Etika adalah istilah yang didapat dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang dapat diartikan tempat tinggal yang biasa, diartikan pula sebagai padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, sikap, perasaan, serta cara berpikir. Disamping itu, etika juga dimaknai sebagai sebuah ilmu dan bukan ajaran (Tanyid, 2014).

Dalam sudut pandang etika politik, manusia pada dasarnya mempunyai dimensi politis yang bisa ditelaah dari tiga hal yaitu manusia sebagai makhluk sosial, manusia dengan dimensi kesosialannya, serta dimensi politis kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial diejawantahkan sebuah bentuk kesepadanan yang mana seorang manusia bebas melakukan tindakan menurut keinginannya, tetapi akan berarti ketika telah berada di tengah-tengah manusia yang lain. Maksudnya adalah manusia akan dilihat eksistensinya karena orang lain ada serta hanya dapat hidup dan berkembang juga karena orang lain ada. Dimensi kesosialan manusia dimaknai sebagai penemuan jati diri seorang individu ketika bersama dengan orang lain. Dimensi politis kehidupan manusia adalah fungsi pengatur kerangka kehidupan masyarakat baik secara normatif maupun efektif (Pasaribu, 2013).

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap etika politik yaitu kasus korupsi di Indonesia masih menjadi problematik teratas yang harus segera ditangani. Bahkan hal tersebut terindikasi dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurut *Transparency International* Indonesia 2021 pada tahun 2020 yang berada di skor 37/100, dengan kata lain berada di posisi 102 dari 180 negara. Sebelumnya, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di kisaran 40/100, dapat disimpulkan jika pada tahun 2020 telah terjadi penurunan Indeks Persepsi Korupsi. Kasus korupsi yang

dilakukan pada seorang pejabat publik ini menunjukkan betapa kotornya perpolitikan bangsa Indonesia. Di samping itu korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik mencerminkan bahwa mereka telah kehilangan dimensinya sebagai makhluk sosial, dimensi kesosialannya, dan juga dimensi politisnya. Manusia yang seharusnya mampu bersikap dengan menghargai dan menghormati hak-hak sosial justru menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tersebut merupakan indikasi bahwa dimensi politis yang seharusnya mampu menata kehidupan baik normatif maupun efektif tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Pada hakikatnya, negara dan politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Politik riil merupakan suatu pertarungan kekuatan. Asas politik juga dianggap sebagai dunia ideal yang tidak mencontohkan kerasnya realitas yang terjadi di dalam politik (Haryatmoko, 2016). Etika politik sangat dibutuhkan di setiap kondisi baik kondisi normal, tertib, terkendali, atau bahkan kondisi kacau. Terlebih saat kondisi kacau, karena etika politik akan menumbuhkan mekanisme berbicara dengan otoritas atau dalam arti lain bertapa pun kasar dan tidak santunnya suatu politik, maka tetap setiap tindakannya memerlukan legitimasi. Legitimasi ini berkaitan dengan norma moral, nilai-nilai, hukum, maupun peraturan.

Kemudian, etika politik juga akan melihat dari sudut pandang korban, korban yang akan memunculkan simpati serta reaksi *indignation* atau terusik dan protes terhadap ketidakadilan. Dalam keadaan yang baik dan normal, etika politik juga sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya sikap dan perilaku politik penyelenggara negara yang bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan negara. Etika politik juga dibutuhkan untuk memastikan agar kesejahteraan, keadilan, serta kebahagiaan tertinggi masyarakat dapat terwujud, sebab etika politik akan memberi garis-garis pedoman para penyelenggara negara (Widiarto, 2019).

Dalam menyikapi urgencitas dari etika politik, maka diperlukan sebuah pemahaman dan pemantapan nilai-nilai Pancasila. Pertama adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana di dalamnya terdapat nilai bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seorang manusia wajib menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya (Asmarolini, 2017). Apabila dikaitkan dengan etika politik, mana seorang politisi tentu akan memandang etika politik sebagai salah satu bentuk ketaatannya terhadap Tuhan, sebab di dalam etika politik ada hal-hal yang harus dan tidak boleh untuk dilakukan.

Sila Kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, etika politik dalam menuntut seorang manusia untuk bertanggung jawab atas segala tindakan moralnya bisa menjadi cerminan apa dia merupakan manusia yang beradab atau tidak. Di dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab terdapat nilai-nilai arif seperti prinsip-prinsip asasi, cinta sesama manusia, jujur, persamaan derajat manusia, keadilan, serta keadaban (Eddy, 2018). Ketiga adalah sila Persatuan Indonesia yang bermakna satu kesatuan bulat dan tidak terpecah belah (Ayu & Trisiana, 2018), adanya konflik akibat perbedaan pandangan politik tidak seharusnya terjadi apabila etika politik dimaknai dengan benar,

kerap kali dimensi kesosialan seorang manusia menjadi hilang ketika mereka telah dikotak-kotakkan ke dalam pandangan politik yang berbeda-beda dan saling menjatuhkan. Inilah mengapa kemudian sila Persatuan Indonesia mampu mengiring penerapan etika politik di tengah-tengah masyarakat.

Keempat adalah sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang di dalamnya dapat diartikan tentang demokrasi, kejujuran, serta kebersamaan dalam memutuskan suatu hal (Rube'i, 2019).

Pengambilan opsi kebijakan tertentu yang masih diikuti oleh latar belakang golongan tertentu jelas mencerminkan etika politik yang tidak baik, pada akhirnya kebijakan yang diambil oleh pejabat publik hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Tidak adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh para pejabat publik tersebut akan terkait dengan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang mana etika politik yang buruk tentu akan menghambat tercapainya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Menurut (Muslimin, 2016) Pancasila sebagai ideologi nasional akan mampu mengendalikan paham perseorangan, golongan, suku bangsa, juga agama. Maka masyarakat benar-benar menerapkan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam kesatuan yang utuh. Di samping itu, Pancasila juga berusaha untuk menjunjung kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia juga telah tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat diartikan sebagai satu kesatuan pandangan, keyakinan, cita-cita, serta mutu-mutu bangsa Indonesia yang mesti diterapkan di setiap aspek kehidupan (Febriansyah, 2017).

## **Kesimpulan**

Etika politik adalah suatu hal yang paling penting untuk dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik mereka politisi atau tidak, karena pada dasarnya kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dijauhkan dari politik. Etika politik terbukti sangat dibutuhkan di setiap kondisi baik kondisi normal maupun kacau karena tujuan dari etika politik adalah membawa kebaikan bersama.

Penerapan etika politik di Indonesia masih bisa dikatakan perlu ditingkatkan kembali sebab ada beberapa kasus salah satunya tindak pidana korupsi yang jelas-jelas mencoreng etika dalam hal politik seseorang. Karena Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang telah menjiwai pelaksanaan etika politik sebagaimana mestinya. Mulai dari sila pertama hingga sila kelima Pancasila dapat dijadikan titik balik bagi etika politik masyarakat Indonesia.

### Bibliografi

- Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 50–64.
- Ayu, F. M. S., & Trisiana, A. (2018). Penguatan Pancasila Dalam Perbuatan (Alternatif Tindakan Kuratif Di Era Globalisasi). *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2).
- Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 18(1), 116–123.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1–27.
- Gorys Keraf, D. (2010). *Diksi dan gaya bahasa*. Jakarta. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Haryatmoko, J. (2016). *Etika politik dan kekuasaan*. Jakarta. Kompas.
- Muslimin, H. (2016). Tantangan terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30–38.
- Pasaribu, R. B. F. (2013). *Pancasila Sebagai Etika Politik*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*. Jakarta. HarperCollins.
- Rahayu, A. S. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta Bumi Aksara.
- Rube'i, M. A. (2019). Implementasi Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Pada Mahasiswa Program Studi Ppkn Ikip Pgri Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2).
- Ruslan, I. (2013). Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan Nilai Islam dalam Pancasila. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 1–16.
- Suharjito, D. (2019). *Pengantar metodologi penelitian*. Bogor. PT Penerbit IPB Press.
- Tanyid, M. (2014). Etika dalam pendidikan: Kajian etis tentang krisis moral berdampak pada pendidikan. *Jurnal Jaffray*, 12(2), 235–250.
- Widiarto, A. (2019). Urgensi Regulasi Etika Bagi Penyelenggara Negara. *Jurnal Niagara*, 11(1), 73–91.